

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

RITA MAULIDA
NPM : 1902110011



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RITA MAULIDA
NPM : 1902110011

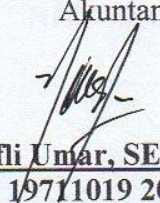
Dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)
KABUPATEN ACEH SELATAN**

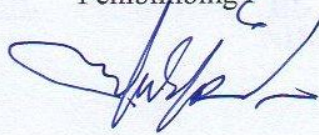
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

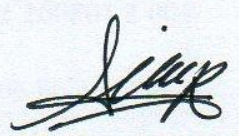
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


H. Mulyadi AR, SE, M.Si.
NIK. 19620917 200204 1 001

Pembimbing II


Maidar, SE, M.Si.
NIK. 19801231 200802 2 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. Tarmizi Cadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RITA MAULIDA
NPM : 1902110011

Dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 09 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001

Anggota

H. Mulyadi AR, SE, M.Si.
NIK. 19620917 200204 1 001

Anggota

Maidar, SE, M.Si.
NIK. 19801231 200802 2 001



Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 14 Agustus 2023
Yang Menyatakan



RITA MAULIDA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rita Maulida

NPM : 1902110011

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN ACEH SELATAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan



RITA MAULIDA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Argaria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Isnin dan Ibunda Asnidar tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis Rizaldi dan Azkia Dhalila yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Bapak Mulyadi AR, SE, M.Si selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Maidar, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan Mira, Uswah, Sisi, Mawaddah, Rika, Fathanil, Anggun, Shelly, Irma, Dian, Susi, Herlina, Arianda, Irfandi, Alna, Fika, Zahra, Fatira, Zaki, Aqsa, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada kepada Ismawardi yang telah membantu temani penulis melakukan penelitian Argaria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup.....	7
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	8
2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	10
2.1.3 Basis Akuntansi di pemerintahan.....	11
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.....	12
2.1.5 Basis Akrua	14
2.1.6 Manfaat Akuntansi Berbasis Akrua.....	16
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah	19
2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua	20
2.3 Penelitian Sebelumnya	26
2.4 Kerangka Pemikiran.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	32
3.1.1 Objek dan Lokasi Penelitian.....	32
3.1.2 Jenis Penelitian	32
3.1.3 Horizon Waktu Studi	33
3.1.4 Unit Analisis	33
3.1.5 Unit Observasi	34
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3 Metode Analisis	35

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.1.1	Profil Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan	36
4.1.2	Visi dan Misi Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan	37
4.1.3	Tugas dan Kewenangan Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan	38
4.2	Hasil Penelitian	39
4.2.1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan	39
4.2.2	Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan	41
4.3	Pembahasan.....	46
4.3.1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Aceh Selatan	46
4.3.2	Evaluasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Basis Kas, Basis Kas Menuju AkruaI dan Basis AkruaI.....	12
Tabel 2.2	Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah.....	21
Tabel 2.3	Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	21
Tabel 2.4	Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	22
Tabel 2.5	Format Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten/Kota .	23
Tabel 2.6	Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	24
Tabel 2.7	Format Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten/Kota...	24
Tabel 2.8	Penelitian Sebelumnya	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	42

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)
KABUPATEN ACEH SELATAN**

RITA MAULIDA
NPM : 1902110011

Pembimbing I : H. Mulyadi AR, SE, M.Si.
Pembimbing II : Maidar, SE, M.Si.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif. Objek penelitiannya adalah Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Aceh Selatan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Saat ini Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan lancar dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun terdapat kelemahan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dikarenakan aplikasi yang sangat bergantung pada jaringan internet yang ada, tanpa internet aplikasi ini tidak akan dapat digunakan.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT
ACCOUNTING STANDARDS ON AGRARIAN SPATIAL PLANNING/
NATIONAL LAND AGENCY (ATR/BPN)
ACEH SELATAN DISTRICT**

RITA MAULIDA
Reg. No : 1902110011

Advisor I : Mulyadi AR, SE, M.Si
Advisor II : Maidar, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the application of accrual-based government accounting standards to Agrarian Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) of South Aceh District. The analysis model that will be used is a qualitative analysis method. The research object is the Application of the implementation of accrual-based government accounting standards in Agrarian Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) of South Aceh Regency. The results showed that the application of accrual-based government accounting standards to Agrarian Tata Spatial/National Land Agency (ATR/BPN) of South Aceh Regency, namely based on Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, which includes budget realization reports (LRA), balance sheets, cash flow reports, reports on changes in excess budget balances, operational reports, reports on changes in equity and notes on financial statements. Currently Agrarian Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) of South Aceh District has been running smoothly in implementing accrual-based government accounting standards. However, there are weaknesses in applying accrual-based government accounting standards using the Agency Level Financial Application System (SAKTI) application because the application is highly dependent on the existing internet network, without the internet this application cannot be used.

Keywords: *Application of Accrual-Based Government Accounting Standards*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi pemerintahan dapat dilihat dari era orde baru hingga era pasca reformasi. Kemudian perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan reformasi dibidang keuangan Negara. Pemerintahan Indonesia melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan dituntut agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi awal mula pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang tranparan dan akuntabel.

Transparan merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya. Akuntabel merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat

sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan berbasis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 UU ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja pengukuran berbasis kas.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual telah mempunyai landasan hukum. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pengertian SAP Berbasis Akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 meliputi SAP terdapat dua yaitu basis kas dan basis akrual. Basis di antara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis akrual.

Apabila proses transisi dilakukan dari basis akrual maka akan semakin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi. Dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain juga dapat disediakan.

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik dari pada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya mengaplikasikan basis akrual dalam Akuntansi Sektor Publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik (Mardiasmo, 2018:154).

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari basis kas menjadi akrual mendorong para pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengikuti peraturan yang baru yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai pengaturan terhadap peningkatan karakteristik kualitatif dalam perubahan standar akuntansi pemerintah yang baru.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan APBN/APBD. Berlakunya SAP Berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Perubahan basis tersebut selain sudah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga di harapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Akuntansi Berbasis Akrual telah berhasil di terapkan di berbagai Negara maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan dan Filipina. Sistem Akuntansi yang di terapkan di Negara ini telah mampu memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem basis kas dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual antara lain, mendukung manajemen kerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperluas dan meningkatkan informasi dan alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, dan memfasilitasi atau meningkatkan manajemen aset termasuk kas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Dalam Lampiran 1.02, diungkapkan bahwa neraca menyajikan pos aset, kewajiban dan ekuitas di mana aset di klasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar, kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Laporan Operasional (LO) sekurang-kurangnya menyajikan pos pendapatan dari kegiatan operasional, pos luar biasa bila ada, surplus/defisit laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang

bertanggungjawab kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Wilayah Propinsi Aceh. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.2005/BALAP.07/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Kementrian/Lembaga. Melalui pesan tersebut diharapkan Kualitas Laporan Keuangan Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bagian Keuangan (Dedi) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan bahwasannya dalam penyusunan anggaran sudah menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan seterusnya penulis disingkat menjadi SAKTI. Untuk perawatan *software* SAKTI, akan tetapi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) masih bergantung kepada tim satuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akibatnya apabila ada kerusakan teknis, meskipun sangat sederhana tidak bisa segera di atasi sendiri oleh pegawai. Sehingga berdampak pada kinerja pegawai yang kurang efektif dan efisien dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dan salah satu dampak tersebut seperti dalam pengelolaan keuangan atau tingkat realisasi keuangan. Dampak lain dari penerapan standar akuntansi berbasis akrual

yang belum sempurna seperti pada perencanaan dan penyusunan kerja yang kurang tepat dengan sasaran kerja yang telah direncanakan sebelumnya baik itu masalah pencapaian kerja maupun pengelolaan atau perencanaan anggaran.

Namun dalam penggunaan aplikasi SAKTI masih terdapat kendala bagi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan seperti pada sumber daya manusia dan penerapan sistem SAKTI harus menggunakan internet. Rendahnya pelatihan yang diadakan menjadi salah kendala bagi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan berbasis akrual. Kemudian dalam penggunaan aplikasi SAKTI pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh adalah aplikasi yang sangat bergantung pada jaringan internet yang ada. Tanpa internet aplikasi ini tidak akan dapat digunakan. Hal ini selain sebagai kelebihan juga sekaligus sebagai salah satu kekurangan. Dengan bergantung pada jaringan internet, maka Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh harus memiliki jaringan internet yang stabil agar dapat menggunakan aplikasi SAKTI.

Berdasarkan fenomena di atas sehingga hal ini menarik penulis untuk mengambil judul dalam bentuk skripsi “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti mengenai penerapan SAP berbasis akrual dan kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.
2. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah yang menggunakan SAP berbasis akrual.
3. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah yang menggunakan SAP berbasis akrual.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini memfokuskan dalam analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (3) tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Argaria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kuantitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan utama menurut SAP diantaranya : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintah menurut Kusuma (2014:4), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pamarintah merevisi PP NO. 20 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang

lebih transparan dan akuntabel. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas. Standar Akuntansi Pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal yaitu : pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Mahsun (2014 : 65) menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menerapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut SAP. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Mahmudi (2016 : 271) SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterapkan dalam penyusunan dan mengkaji laporan keuangan pada sebuah organisasi pemerintahan. Manfaat adanya standar akuntansi digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan,
2. Digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menuntukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya,
3. Digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan
4. Diperlukan untuk meninterpretasikan informasi dalam laporan keuangan
5. Diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan ,
6. Menjadikan acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun

2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara guna mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2016 : 271).

2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan

tujuan agar lebih akuntansi dan kualitas laporan keuangan tersebut semakin berkualitas.

2.1.3 Basis Akuntansi di Pemerintahan

Basis akuntansi yang pernah digunakan di pemerintahan, yaitu :

1. Basis kas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Basis kas menuju akrual menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis kas.
3. Basis akrual dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (10) Lampiran 1.02 PSAP paragraf 8 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dapat dilihat perbedaan basis kas, basis kas menuju akrual dan basis akrual pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbedaan Basis Kas, Basis Kas Menuju AkruaI dan Basis AkruaI

No.	SAP Basis Kas	SAP Basis Kas Menuju AkruaI	SAP Basis AkruaI
1.	Mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau dibayar	Mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui asset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI	Mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa tanpa memperhatikan kas atau setara kas dibayar
2.	LKPD terdiri dari 5 Laporan, yaitu : - Laporan Realisasi Anggaran, - Neraca, - Laporan Operasional, - Laporan Perubahan Ekuitas, - CaLK	LKPD terdiri dari 4 Laporan, yaitu : - Laporan Realisasi Anggaran, - Neraca, - Laporan Arus Kas, - CaLK	LKPD terdiri dari 7 Laporan, yaitu : - Laporan Realisasi Anggaran, - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, - Neraca - Laporan Operasional, - Laporan Perubahan Ekuitas, - Laporan Arus Kas, - CaLK

Sumber: Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 71 Tahun 2010.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI

Menurut Fauziah (2018:1) dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitaskan manajemen keuangan aset yang lebih transparan dan akuntabel maka perlu penerapan akuntansi berbasis akruaI yang merupakan *best practice* (praktik terbaik) di dunia internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI merupakan standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 tentang keuangan Negara menegaskan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 70 Ayat (2), menegaskan kembali tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

SAP berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) adalah SAP yang diberikan judul, nomor, dan tanggal mulai berlaku dan diterapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan SAP kepada suatu komite standar yang independen.

Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2004 pasal 57 tentang Pembendaharaan Negara dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang untuk pertama kali diterapkan dengan keputusan Presiden RI No. 84 Tahun 2004 tentang Keanggotaan KSAP, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2009. KSAP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi

pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

2.1.5 Basis Akrua

Menurut Riyanto dan Puji (2015:13-14), Basis akrual adalah suatu dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan pengaruh transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan keuangan dimaksud selanjutnya akan menjadi informasi sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan yang bermutu. Basis akuntansi yang pernah digunakan di pemerintahan, yaitu basis kas, basis kas menuju akrual, dan basis akrual.

Menurut Riyanto dan Puji. (2015:13-14) Akuntansi Berbasis Akrua Merupakan *International Best Practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan *Prinsip New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Basis akrual pada konsepnya ada dua yaitu:

1. Pengakuan pendapatan

Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal kurang penting. Oleh karena dalam basis akrual

kemudahan muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

2. Pengakuan beban

Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, sehingga dengan kata lain pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

Adapun kelebihan akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena memenuhi asas “semakin baik informasi maka semakin baik keputusan”.
2. Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat.
3. Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah.
4. Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban, ekuitas yang lebih baik.
5. Pengukuran penilaian biaya suatu program/ kegiatan yang lebih baik.
6. Sesuai dengan reformasi manajemen keuangan pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang.
7. Sesuai dengan *International Best Practices*, termasuk untuk kebutuhan *Government Finances Statistics* (GFS) yang berbasis akrual.
8. Mengakumulasi kewajiban pembayaran pension.
9. Menyelaraskan/meratakan belanja model dengan akuntansi penyusutan.
10. Mewaspada pada resiko default utang yang akan jatuh tempo bersanksi denda.
11. Memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar dimasa depan yang masih jauh tanpa tergesa-gesa.
12. Memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan Negara dari sekadar gambaran kas.
13. Mengubah perilaku keuangan para penggunaanya menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Sedangkan kekurangan akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut:

1. Relatif lebih kompleks dibandingkan basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akrual, sehingga dapat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi akuntansi yang memadai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (10)

menjelaskan bahwa Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Lamonisi (2016:3)

menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD.

2.1.6 Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut PSAP 01 manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yaitu :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dan mendanai aktivitasnya.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Transaksi keuangan adalah segala macam kegiatan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, seperti penjualan dan pembelian. Bagian akuntansi di perusahaan akan mengolah data transaksi tersebut, baik secara manual maupun dengan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*), yang sudah bisa mereka gunakan. (Prihadi, 2019:8).

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut PP No 71 tahun 2010 terdapat beberapa kelompok utama dalam Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat.
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
4. Pemerintah.

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Menurut Moermahadi (2017:2) pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun

politik. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Fauziah 2018:27) yaitu :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Menurut PSAP No 1 pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai ;

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi,

transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Pemerintah Daerah

Menurut Basir (2020:25) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat diandalkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengaturan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua

Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, laporan pokok pemerintah daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Contoh penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

No.	Uraian	Anggaran (20X1)	Realisasi (20X1)	%	Realisasi (20X0)
1.	PENDAPATAN				
2.	Pendapatan Asli Daerah				
3.	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4.	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan	xxx	xxx	xx	xxx
6.	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
7.	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxxx	xxxx	xx	xxxx

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LP-SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- Saldo anggaran lebih awal.
- Penggunaan saldo anggaran lebih.
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
- Saldo anggaran lebih akhir.
- lain-lain.

Contoh penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	20X1	20X0
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3.	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4.	Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5.	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7.	Lain-lain	xxx	xxx
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Contoh penyajian Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Uraian	20X1	20X0
1.	Aset		
2.	Aset Lancar		
3.	Kas Di Kas Daerah	xxx	xxx
4.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5.	Kas Di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6.	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7.	Piutang Pajak	xxx	xxx
8.	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9.	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
10.	Belanja Dibayar Dimuka	Xxx	xxx
11.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
12.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
13.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
14.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
15.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
16.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
17.	Piutang Lainnya	xxx	xxx
18.	Persediaan	xxx	xxx
19.	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan

Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Contoh penyajian Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Format Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Anggaran (20X1)	Realisasi (20X1)	Kenaikan/ penurunan	Realisasi (20X0)
1.	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
	<u>PENDAPATAN</u>				
	Pendapatan Asli Daerah				
	– Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	– Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	– Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
	– Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxxx	xxxx	xx	xxxx

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Uraian	20X1	20X0
1.	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2.	Surplus/Defisit Lo	xxx	xxx
3.	Dampak Kumulatif Perubahan/Kesalahan Mendasar		
4.	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6.	Lain-lain	xxx	xxx
7.	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Contoh penyajian Laporan Arus Kas (LAK) Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Format Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Uraian	20X1	20X0
1.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2.	Arus Masuk Kas		
3.	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4.	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5.	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
6.	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx
7.	Penerimaan Dana Bagi hasil Pajak	xxx	xxx
8.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9.	Penerimaan Alokasi Umum	xxx	xxx
10.	Penerimaan Alokasi Khusus	xxx	xxx
11.	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12.	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13.	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14.	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15.	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16.	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
17.	Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
18.	Penerimaan dan Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19.	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum Negara/daerah dan sebagai kuasa bendaharawan umum Negara/daerah. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otoritas anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi sudah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan anggaran yang memuat anggaran yang realisasi.

Entitas pelaporan juga menyajikan saldo anggaran lebih pemerintah yang mencakup saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran

lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dimasa yang akan datang.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti yang sesuai dengan penelitian saat ini antara lain :

1. Dias (2016) dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT sudah menerapkan standar akuntansi berbasis akrua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhitung sejak 1 Januari 2015.
2. Lamonisi (2016) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pada Pemerintah Kota Tomohon. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota Tomohon dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan

dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual signifikasi peramn pemerintah dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang trasparan dan akuntabel, semakin nyata, Peraturan Pemerintahan tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan daerah tadak terkecuali pemerintah Kota Termohon mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

3. Langelo (2015) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyajian Laporan Keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No. 24 tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kebdala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secar kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji.
4. Dora (2014) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus pada BPKD Kota Medan). Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis

Akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen, SDM, Sarana Prasarana, serta Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

5. Niu (2014) dengan judul Analisis Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan keuangan Kantor Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mobagu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Kantor Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeah Kota Mobagu dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 serta perbedaan penyajian laporan keuangan berdasarkan basis akrual dan basis kas dalam Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan DPKAD Kota Mobagu dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Untuk lebih jelas, penelitian sebelumnya juga dapat dilihat secara ringkasan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT. Dias, (2016)	Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhitung sejak 1 Januari 2015.	Sama-sama meneliti tentang Penerapam Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.	Perbedaan penelitian ini terletak kepada objek penelitian

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Judul, Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pada Pemerintah Kota Termohon. Lamonisi (2016)	Deskriptif Kualitatif	Peraturan Pemerintahan tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan daerah tidak terkecuali pemerintah Kota Termohon mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.	Sama-sama meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.	Perbedaan penelitian ini terletak kepada objek penelitian
3	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Langelo (2015)	Kualitatif	menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No. 24 tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrua, terdapat kebdala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji.	Sama-sama meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.	Perbedaan penelitian ini terletak kepada objek penelitian.
4	Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (studi Kasus pada BPKD Kota Medan) Dora (2014).	Kualitatif	menunjukkan kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen, SDM, Sarana Prasarana, serta Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.	Sama-sama meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.	Perbedaan penelitian ini terletak kepada objek penelitian.
5	Analisis Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan keuangan Kantor Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mobagu, Niu (2014).	Deskriptif Kualitatif	menunjukkan DPKAD Kota Mobagu dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.	Sama-sama meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.	Perbedaan penelitian ini terletak kepada objek penelitian

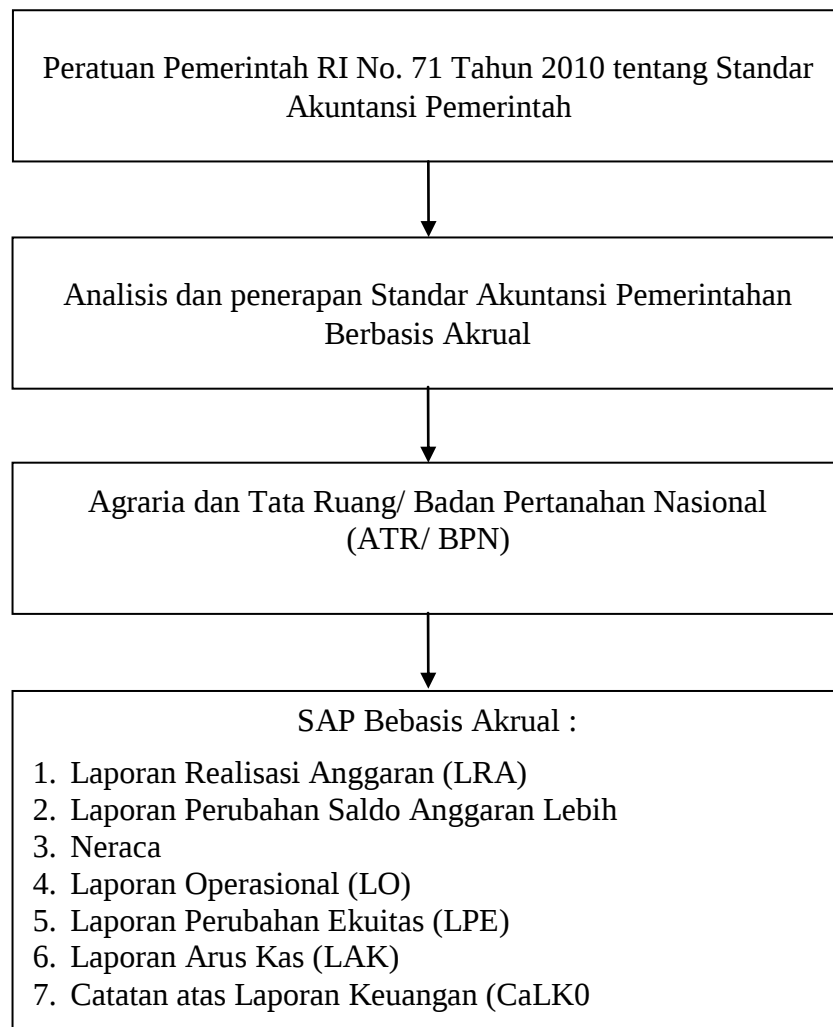
Sumber : Data diolah 2023

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut PP No.71 Tahun 2010 SAP Berbasis AkruaI merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Mengaplikasikan basis akrual dalam akuntansi sector publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien atas sumber dayanya.

Kerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Aceh Selatan pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan kerja pemerintah yang baik. Dengan adanya kerangka konseptual ini dapat memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan permasalahan dan menjawab pertanyaan terkait dengan objek penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual yang dibangun dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 2.1.

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis AkruaI pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan



Sumber : Data diolah Peneliti 2023

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ialah merupakan teknik dalam perencanaan yang berguna sebagai paduan untuk menghasilkan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dikarenakan semua yang akan dilakukan telah terencana berdasarkan penelitian dan merupakan suatu skema yang mencakup semua program penelitian.

3.1.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 31 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan..

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana pada metode ini penulis melakukan analisis terhadap objek penelitian yang diangkat serta melakukan studi kasus untuk memberikan informasi sesuai dengan kasus yang diangkat. Menurut Sukmadinata (2016:73), menjelaskan bahwa peneliti deskriptif kualitatif ditujuk untuk mendepskrisikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan selain itu, penelitian deskriptif

tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan membandingkan hasil penelitian tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teori dan studi pustaka sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan perbaikan yang sifatnya membangun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam proses penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

3.1.3 Horizon Waktu Studi

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi longitudinal (membujur), yaitu data variabel yang dikumpulkan secara bertahap (dua atau lebih) dalam batas waktu periode untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang berkenaan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

3.1.5 Unit Observasi

Unit observasi dalam penelitian adalah bidang keuangan dan bidang umum selaku penanggungjawab terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada A Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan beserta stafnya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Menurut Purwanza (2022:12) Data Sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perusahaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan :

2. Wawancara

Menurut Gunawan (2016:160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Pada metode wawancara ini penelitian menggali dan mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Yang menjadi subjek dan responden dalam penelitian ini adalah bagian bidang keuangan.

3. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:157), observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) dan kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu. Penelitian ini melakukan observasi dengan mengamati langsung proses transaksi agar mendapatkan data yang objektif dan sistematis.

3.3 Metode Analisis

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2014 :157) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif (*Descriptive Analysis Method*). Metode analisis deskriptif yakni suatu metode yang memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 31 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dibentuk pada Tahun 2004 empat tahun setelah pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dari Kabupaten Aceh Selatan. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2023 adalah "terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki Tujuan Utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dirumuskan Sasaran Strategis Tahun 2015-2023 adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Agraria yang Adil dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Ruang yang aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan;
3. Berkurangnya Kasus Tata Ruang dan Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara).

Tujuan Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut harus dilaksanakan oleh Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten/Kota melalui Program-program yaitu :

1. Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di daerah;
2. Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di daerah;
3. Program Penataan Agraria di daerah;
4. Program Pengadaan Tanah di daerah;
5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di daerah;
6. Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di daerah;
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di daerah

4.1.2 Visi dan Misi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan mempunyai visi yaitu "menjadi Kantor yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan". Sedangkan misi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
2. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3. Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah dan pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi tanah dan legalisasi aset;
4. Menurunnya tingkat permasalahan agraria (Perkara, Sengketa dan Konflik Pertanahan);
5. Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan yang handal;
6. Terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan Reforma Agraria;

4.1.3 Tugas dan Kewenangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu bidang pertanahan:
2. Merumuskan Kebijakan teknis bidang pertanahan:
3. Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan mempunyai Fungsi ;

1. Perencanaan Strategis pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN);
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
3. Pengumpulan dan Pengolahan *database* serta analisis data di Bidang pertanahan;
4. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Kantor;
5. Pelaksanaan Penetapan Subyek dan Obyek tanah serta tanah absente;

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi

dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Penyusunan Laporan keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

PP Nomor 71 Tahun 2010, yang merupakan peraturan yang menetapkan Sistem akuntansi keuangan daerah yang disusun dengan berlandaskan pada penggunaan basis akrual (*accrual*). PSAP berbasis akrual disajikan pada lampiran 1 sampai dengan 12 Pernyataan Sistem akuntansi keuangan daerah (PSAP) yang dengan diawali dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Dalam akuntansi akrual ini, entitas pelaporan harus dapat menyajikan 7 (tujuh) jenis laporan keuangan. Dalam PSAP berbasis akrual, laporan keuangan dikelompokkan ke dalam dua kelompok laporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan kelompok laporan finansial yang sudah menggunakan basis akrual. Dalam laporan finansial terdapat laporan operasional yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dengan menggunakan basis akrual.

SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

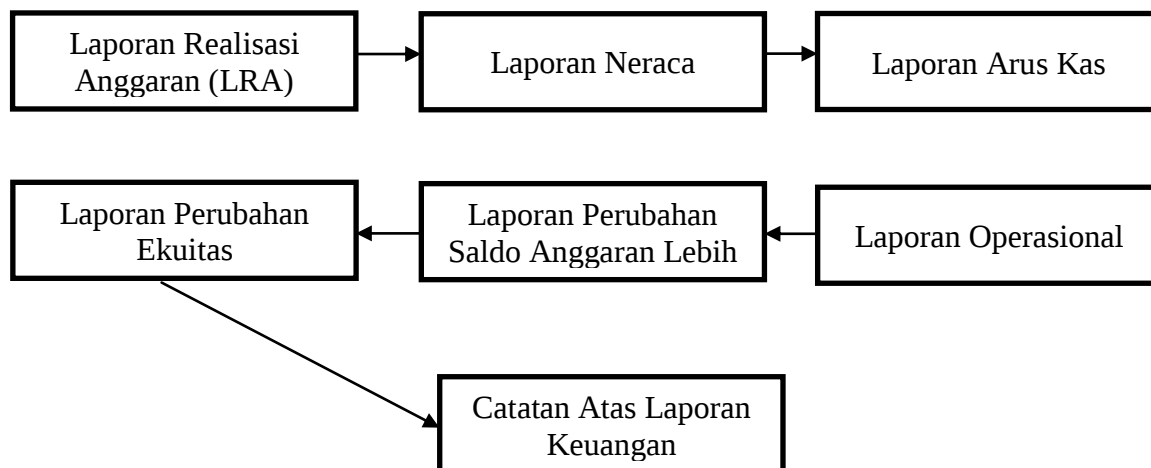
Penggunaan akuntansi akrual Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekadar basis kas. Secara umum, akuntansi akrual telah diterapkan di satua kerja perangkat daerah yang lebih dahulu melakukan reformasi manajemen publik.

4.2.2 Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Argaria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Aceh Selatan

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa peristiwa yang lain, diatur dalam Sistem akuntansi keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lainnya. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, neraca dan belanja modal, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Urutan penyajian laporan keuangan dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

**Sumber: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Kabupaten Aceh Selatan (2023)**

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Laporan Neraca

Neraca yang disajikan dalam basis kas menuju akrual dan dalam basis akrual sama-sama disusun menggunakan basis akrual. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Tujuan menggunakan neraca pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan untuk mengukur jumlah aset tetap, aset lainnya, kewajiban, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dan jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan selama periode tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan

diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Tujuan dari laporan perubahan ekuitas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan yaitu untuk mengetahui saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran lebih akhir

5. Saldo Anggaran Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

6. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Tujuan laporan operasional Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan atau laporan keuangan, beban dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, kemudian mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Sistem akuntansi keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusunan sistem akuntansi keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan. Komponen laporan keuangan dapat dilihat pada Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Perubahan Ekuita
6. Laporan Operasional
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan dalam Draft Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 7 komponen laporan keuangan dalam draft SAP berbasis akrual yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Unsur-unsur laporan realisasi anggaran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dalam basis akrual:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara A Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Neraca

Unsur neraca pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dalam basis akrual adalah:

- a. Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan Arus Kas

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan .
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan .

4. Laporan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Unsur-Unsur Laporan Perubahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir.

6. Laporan Operasional

Tujuan pelaporan operasi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan menyediakan:

- a. Informasi mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Informasi mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Informasi yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

- d. Informasi mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-Unsur Laporan Operasional Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional ;
- c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Sistem akuntansi keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.3.2 Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Argaria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Aceh Selatan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sistem yang digunakan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan

Pelaporan pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

Pengguna laporan keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. Laporan Realisasi Anggaran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan

dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Sistem akuntansi keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan sistem akuntansi keuangan daerah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari wawancara dan dokumentasi bahwa Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat siap dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Namun masih perlu adanya pembelajaran. Kehadiran Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dinilai sedikit menyulitkan hal tersebut berangkat dari kendala yang dihadapi yaitu sumber daya manusia. Rendahnya pelatihan yang di adakan menjadi salah kendala bagi Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan berbasis akrual. Kemudian dalam penggunaan aplikasi SAKTI pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh adalah aplikasi yang sangat bergantung pada jaringan internet yang ada. Tanpa internet aplikasi ini tidak akan dapat digunakan. Hal ini selain sebagai kelebihan juga sekaligus sebagai salah satu kekurangan. Dengan bergantung pada jaringan internet, maka Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh harus memiliki jaringan internet yang stabil agar dapat menggunakan aplikasi SAKTI.

Kemudian yang menjadi hambatan bagi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan dari sistem informasi, sumber daya manusia, strategi dasar yang dapat dipergunakan untuk Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yaitu dengan mengandalkan sumber daya manusia yang memahami regulasi di bidang keuangan dan akuntansi. Dimana pengelolaan sumber daya manusia berarti penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya karena secara rata-rata penelitian sebelumnya dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menggunakan pedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, artinya hasil penelitian ini juga mengacu pada peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dari Dias (2016) menyatakan bahwa pemerintah telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhitung sejak 1 Januari 2015. Kemudian hasil penelitian dari Lamonisi (2016) menyatakan bahwa dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual signifikansi peran pemerintah dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata, peraturan pemerintahan tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan daerah tidak terkecuali pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat menerapkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Saat ini Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan lancar dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
 - a. Beberapa kelebihan akuntansi berbasis akrual seperti beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya, pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima dan setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.

- b. Beberapa kelemahan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAKTI maka aplikasi yang sangat bergantung pada jaringan internet yang ada. Tanpa internet aplikasi ini tidak akan dapat digunakan. Hal ini selain sebagai kelebihan juga sekaligus sebagai salah satu kekurangan. Dengan bergantung pada jaringan internet, maka Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Aceh harus memiliki jaringan internet yang stabil agar dapat menggunakan aplikasi SAKTI.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan training atau pelatihan berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut dan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna untuk aparatur dapat menyelesaikan tugas berdasarkan sistem akuntansi keuangan pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Aceh Selatan yang telah diterapkan.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual saja, tapi juga masalah lainnya seperti bagaimana sistemnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuba, Abdul. M. (2016) Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Basir, C. A.H., M.H.I. (2020). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi*. Cetakan Kesatu, Jakarta : Kencana.
- Dagong, S. (2014). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Kota Gorontalo (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo). *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
- Dias, A.A (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
- Dora, Sofia. (2014). Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus pada BPKD Kota Medan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP NOMMENSEN Medan.
- Fauziah, Ifat. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Ilmu.
- Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-IV. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Gustina, Findi Zellia. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Argaria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
- Indriantoro, Nur., & Supomo, Bambang. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Komaruddin, Y. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintahan Kota Bandung). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Vol. 1 No. 2*, hlm 1-9.
- Kusuma, Arif Ardi. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada SKPD/DPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
- Lamonisi, Sony. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Termohon. *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1*, Maret 2016, hlm. 223-230.

- Langelo, Friska, (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 No. 1. 2015. hlm. 001- 117.
- Niu, F.A.L. (2014). Analisis Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mobagu. *Jurnal EMBA* Vol. 2 No. 4. 2014. hlm. 714-831.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UII Press.
- Mahsun, M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi.
- Moermahadi S. Djanegara. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Cetakan Kesatu*. Bogor : Kesatuan Press.
- Munandar, Arif. (2022). *Metologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung : Media Sain Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal I Ayat (10) *Tentang Basis Akrual*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Fokus Media, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prihadi, Toto. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanza Wahyu Sena, et. al. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Riyanto dan Agus Puji. (2015). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung ; Alfabeta.
- Sukmadinata. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 70 Ayat (2) *Tentang Ketentuan Mengenai Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 *Tentang Keuangan Negara*.